

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH,
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta - 55187
Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415
Email: pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id
Website: www.pt-yogyakarta.go.id

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 ini dapat kami sajikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan Laporan yang menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama tahun 2020, berdasarkan capaian kinerja yang telah dilakukan atas perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta diuraikan mengenai pencapaian (IKU) (Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Analisis Akuntabilitas Kinerja selama tahun 2020.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2020, mempunyai 3 (Tiga) Program yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Mahkamah Agung, serta Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berusaha secara maksimal agar ketiga program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020 telah disusun, namun masih belum sempurna. Oleh karena itu masih diharapkan masukan yang positif dan konstruktif guna kesempurnaan penyusunan laporan ini.

Semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat memacu Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 15 Februari 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



RIPTO, S.H., M.H.

NIR. 19541009 198103 1 006

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| A. Latar Belakang | 3 |
| B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 4 |
| C. Sistematika Penyajian | 7 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA... .. | 9 |
| A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 | 10 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2020 | 12 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 16 |
| A. Capaian kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 16 |
| B. Realisasi Anggaran Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Yogyakarta..... | 42 |
| BAB IV PENUTUP | 45 |
| BAB V LAMPIRAN | 46 |
| 1. Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Yogyakarta | |
| 2. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2020 | |
| 3. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | |
| 6. Matriks Rencana Strategis Review | |
| 7. SK Penetapan Riviui IKU | |
| 8. SK Tim penyusun RENSTRA 2020-2024 | |
| 9. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2020 | |
| 10. SK Tim Evaluasi dan Monev LKjIP Tahun 2020 | |
| 11. Penghargaan yang diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta | |



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020- 2024, yaitu di bidang hukum dan aparatur. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Menengah (RPJM) 2020- 2024, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja dan berkesinambungan. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun

Program kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Strategis yang mengacu pada Pembangunan Jangka Tahunan secara konsisten

2020 adalah sebagai berikut :

Tabel.1 Sasaran Strategis

| No. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | | |
|-----|---|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | URAIAN | TARGET 2020 | REALISASI 2020 | CAPAIAN 2020 |
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor. | 86% 86% 86% | 84,71% 87,09% 77,77% | 98,5% 101,26% 90,43% |
| | | c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi | 36% | 32,12% | 89,22% |
| | | d. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding | 85% | 97,65% | 114,88% |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% |
| | | b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus. | 100% | 100% | 100% |

Hasil capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan, diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.



BAB I PENDAHULUAN



BAB I- PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga menggunakan dana APBN. Baik, tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI



Gambar.1
Gedung Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 51 menyatakan bahwa Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Banding yang diatur dalam undang-undang, dan diperjelas lagi yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, bahwa tugas Pokok Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai *Judicial Power*, yaitu :

- a. Bahwa pada pasal 51 ayat 1 menyatakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 antara lain :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata, pidana biasa, pidana anak dan tipikor di tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta.
4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang- undang melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2019, sebagai berikut :

BAB I - Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta; dan Struktur Organisasi.

BAB II - Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi

Yogyakarta; Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta; dan Penetapan Kinerja.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, menguraikan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020; dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

BAB IV - Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 - 2024, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah "*Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung*".

Penjelasan :

- a. Pengadilan Tinggi Yogyakarta menunjukkan lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Umum di Yogyakarta dalam melakukan aktifitasnya.

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- b. Meningkatkan sistem pelayanan yang meliputi jenis dan bentuk yang dibutuhkan dan kepuasan pengguna terpenuhi;
- c. Mengembangkan sistem *self assesment* secara periodik dan berjenjang;

Sasaran Strategis

Ada 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024, adapun sasaran strategis tersebut telah direview setelah di analisis target serta sasaran strategisnya (matriks renstra terlampir).

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program dan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dituangkan dalam sepuluh sasaran strategis yang merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi

Yogyakarta mempunyai Program Utama Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan Rencana (Renstra) 2020 - 2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai berikut :

Tabel. 2 Rencana Kinerja Tahun 2020

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | |
|----|---|---|----------------------|
| | | URAIAN | TARGET |
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor | 100% 100% 100% |
| | | B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor | 86% 86% 86% |
| | | C. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi | 36% |

| | | | |
|----|--|---|--------------|
| | | D. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding | 85% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | A. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana | 100% 100% |
| | | B. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100% |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 - 2024. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | |
|----|---|---|----------------------|
| | | URAIAN | TARGET |
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor | 100% 100% 100% |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | <p>B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata 86% - Pidana 86% - Pidana Khusus Tipikor 86% | |
| | | <p>C. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasasi 36% | |
| | | <p>D. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding 85%</p> | |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | <p>A. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata 100% - Pidana 100% | |
| | | <p>B. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 100%</p> | |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel.4 Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | | |
|----|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | URAIAN | TARGET 2020 | REALISASI 2020 | CAPAIAN 2020 |
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% |
| | | B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor | 86% 86% 86% | 84,71% 87,09% 77,77% | 98,5% 101,26% 90,43% |
| | | C. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi | 36% | 32,12% | 89,22% |
| | | D. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding | 85% | 97,65% | 114,88% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | A. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% |

| | | | | | |
|--|--|---|------|------|------|
| | | B. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100% | 100% | 100% |
|--|--|---|------|------|------|

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian kinerja melebihi dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian dari sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan belum tercapai realisasinya.

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator, yaitu persentase sisa perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi yogyakarta.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel.5 Target Indikator Kinerja

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | |
|---|--|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | URAIAN | TARGET 2020 | REALISASI 2020 | CAPAIAN 2020 | CAPAIAN 2019 | CAPAIAN 2018 |
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : | 100% | 100% | 100% | | |
| | - Perdata | 100% | 100% | 100% | | |
| | - Pidana | | | | | |
| | - Pidana Khusus Tipikor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : | 86% | 84,71% | 98,5% | | | |
| - Perdata | 86% | 87,09% | 101,26% | 99,79% | 98,73% | |
| - Pidana | | | | | | |
| - Pidana Khusus Tipikor | 86% | 77,77% | 90,43% | | | |
| C. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : | | | | | | |
| - Kasasi | 36% | 32,12% | 89,22% | 100% | 100% | |
| D. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding | | 85% | 97,65% | 114,88% | 114,6 | 105,4% |

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut :

a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Tabel.6.1
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara yang diselesaikan

| Tahun | Tri Wulan | Sisa Yang Harus Diselesaikan | Sisa Yang Diselesaikan | Realisasi |
|-------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|
| 2020 | I | 46 | 46 | 100% |
| | II | 46 | 46 | 100% |
| | III | 46 | 46 | 100% |
| | IV | 46 | 46 | 100% |
| 2019 | I | 42 | 42 | 100% |
| | II | 42 | 42 | 100% |
| | III | 42 | 42 | 100% |
| | IV | 42 | 42 | 100% |

Keterangan : Sisa perkara Tahun lalu yang harus diselesaikan sudah diselesaikan pada tri wulan ke I.

Tabel.6.2
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara *Perdata* yang diselesaikan

| Tahun | Tri Wulan | Sisa Yang Harus Diselesaikan | Sisa Yang Diselesaikan | Realisasi |
|-------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|
| 2020 | I | 27 | 27 | 100% |
| | II | 27 | 27 | 100% |
| | III | 27 | 27 | 100% |
| | IV | 27 | 27 | 100% |
| 2019 | I | 31 | 31 | 100% |
| | II | 31 | 31 | 100% |
| | III | 31 | 31 | 100% |
| | IV | 31 | 31 | 100% |

Keterangan : Sisa perkara Tahun lalu yang harus diselesaikan sudah diselesaikan pada tri wulan ke I.

Tabel.6.3
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara *Pidana* yang diselesaikan

| Tahun | Tri Wulan | Sisa Yang Harus Diselesaikan | Sisa Yang Diselesaikan | Realisasi |
|-------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|
| 2020 | I | 19 | 19 | 100% |
| | II | 19 | 19 | 100% |
| | III | 19 | 19 | 100% |
| | IV | 19 | 19 | 100% |
| 2019 | I | 11 | 11 | 100% |
| | II | 11 | 11 | 100% |
| | III | 11 | 11 | 100% |
| | IV | 11 | 11 | 100% |

Keterangan : Sisa perkara Tahun lalu yang harus diselesaikan sudah diselesaikan pada tri wulan ke I.

Tabel.6.4
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara *Tipikor* yang diselesaikan

| Tahun | Tri Wulan | Sisa Yang Harus Diselesaikan | Sisa Yang Diselesaikan | Realisasi |
|-------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|
| 2020 | I | - | - | - |
| | II | - | - | - |
| | III | - | - | - |
| | IV | - | - | - |
| 2019 | I | - | - | - |
| | II | - | - | - |
| | III | - | - | - |
| | IV | - | - | - |

Keterangan : Tidak ada sisa Perkara Tipikor yang masuk pada pengadilan Tinggi Yogyakarta.

- ❖ Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100% dari jumlah sisa perkara tahun lalu sebanyak 46 perkara dapat diselesaikan 46 perkara. Sehingga persentase capaian untuk indikator ini adalah 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2018, tahun 2019 dan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2020-2024. Tercapainya target persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya ini karena penyelesaian perkara sesuai dengan SOP dan dengan adanya dukungan kinerja yang bagus dari semua unsur Sumber Daya Manusia yang terkait di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dan dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun sebagai berikut :

Tabel 7.1
Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan

| Tahun | Sisa Tahun Lalu | Penyelesaian | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 2020 | 46 | 46 | 100% | 100% | 100% |
| 2019 | 42 | 42 | 100% | 100% | 100% |
| 2018 | 27 | 27 | 100% | 100% | 100% |

Grafik 1. Persentase Sisa Perkara Pidana, Perdata, Tipikor yang diselesaikan



Tabel 7.2
Perbandingan Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan

| Tahun | Sisa Tahun Lalu | Penyelesaian | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 2020 | 27 | 27 | 100% | 100% | 100% |
| 2019 | 31 | 31 | 100% | 100% | 100% |

*Tabel 7.3
Perbandingan Sisa Perkara **Pidana** yang diselesaikan*

| Tahun | Sisa Tahun Lalu | Penyelesaian | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 2020 | 19 | 19 | 100% | 100% | 100% |
| 2019 | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% |

*Tabel 7.4
Perbandingan Sisa Perkara **Tipikor** yang diselesaikan*

| Tahun | Sisa Tahun Lalu | Penyelesaian | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 2020 | - | - | 100% | - | 100% |
| 2019 | - | - | 100% | - | 100% |

❖ Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 86%, jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan sebanyak 221 perkara dari jumlah perkara yang ada sebanyak 213 perkara. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 86% dan memperoleh capaian sebanyak 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 realisasi capaian sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2020-2024. Tercapainya target persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 karena penyelesaian perkara sesuai dengan SOP dan adanya pengawasan rutin yang dilakukan oleh panitera muda, di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 dikarenakan banyaknya perkara yang masuk di akhir tahun pada tahun 2020 sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan yaitu tahun 2021.

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara yang

diselesaikan tepat waktu tahun 2020 Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut :

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 8.1
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara yang diselesaikan tepat waktu

| Tahun | Tri Wulan | Sisa Tahun Lalu | Perkara Yang Masuk | Perkara Yang Putus di Tahun Berjalan | Realisasi |
|-------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|
| 2020 | I | 46 | 52 | 70 | 71,42% |
| | II | 46 | 102 | 126 | 85,13% |
| | III | 46 | 150 | 166 | 84,69% |
| | IV | 46 | 213 | 221 | 85,32% |
| 2019 | I | 42 | 84 | 77 | 61,11% |
| | II | 42 | 133 | 148 | 84,57% |
| | III | 42 | 200 | 214 | 88,42% |
| | IV | 42 | 277 | 273 | 85,57% |

Tabel 8.2
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara *Perdata* yang diselesaikan tepat waktu

| Tahun | Tri Wulan | Sisa Tahun Lalu | Perkara Yang Masuk | Perkara Yang Putus di Tahun Berjalan | Realisasi |
|-------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|
| 2020 | I | 27 | 25 | 36 | 69,23% |
| | II | 27 | 57 | 70 | 83,33% |
| | III | 27 | 89 | 96 | 82,75% |
| | IV | 27 | 130 | 133 | 84,71% |
| 2019 | I | 31 | 48 | 48 | 60,75% |
| | II | 31 | 74 | 90 | 85,71% |
| | III | 31 | 105 | 124 | 91,17% |
| | IV | 31 | 152 | 156 | 85,24% |

Tabel 8.3
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

| Tahun | Tri Wulan | Sisa Tahun Lalu | Perkara Yang Masuk | Perkara Yang Putus di Tahun Berjalan | Realisasi |
|-------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|
| 2020 | I | 19 | 23 | 32 | 76,19% |
| | II | 19 | 38 | 51 | 89,47% |
| | III | 19 | 54 | 63 | 86,30% |
| | IV | 19 | 74 | 81 | 87,09% |
| 2019 | I | 11 | 36 | 29 | 61,70% |
| | II | 11 | 58 | 58 | 84,05% |
| | III | 11 | 94 | 89 | 84,76% |
| | IV | 11 | 124 | 116 | 85,92% |

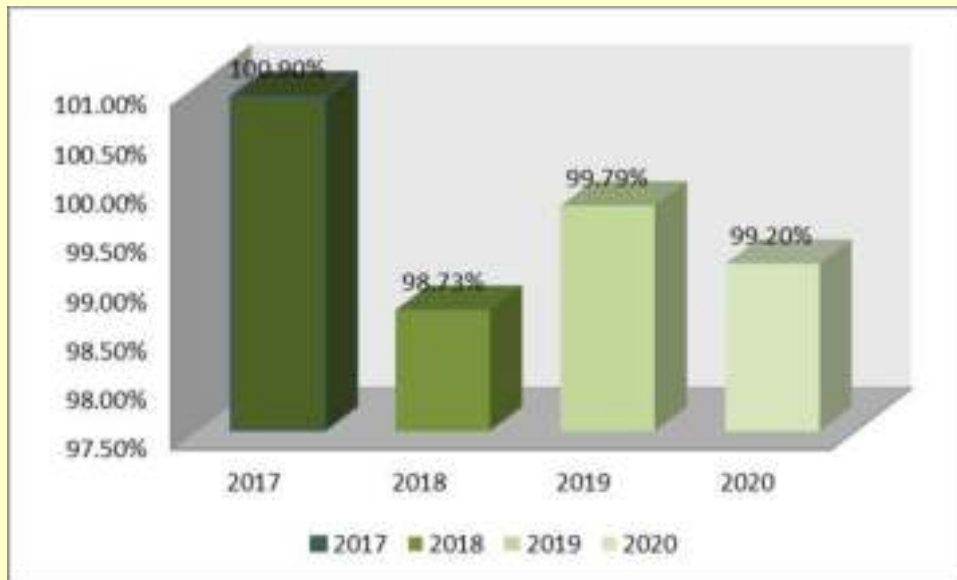
Tabel 8.4
Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu

| Tahun | Tri Wulan | Sisa Tahun Lalu | Perkara Yang Masuk | Perkara Yang Putus di Tahun Berjalan | Realisasi |
|-------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|
| 2020 | I | - | 4 | 2 | 50% |
| | II | - | 7 | 5 | 71,42% |
| | III | - | 7 | 7 | 100% |
| | IV | - | 9 | 7 | 77,77% |
| 2019 | I | - | - | - | - |
| | II | - | 1 | - | 0% |
| | III | - | 1 | 1 | 100% |
| | IV | - | 1 | 1 | 100% |

Tabel 9.
Perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

| Tahun | jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan | jumlah perkara yang ada | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|---|-------------------------|--------|-----------|---------|
| 2020 | 221 | 259 | 86% | 85,32% | 99,20% |
| 2019 | 273 | 319 | 85,76% | 85,58% | 99,79% |
| 2018 | 265 | 307 | 87,75% | 86,32% | 98,73% |
| 2017 | 255 | 288 | 87,75% | 88,54% | 100,9% |

Grafik 2.
Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu



Keterangan :

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 86%, jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan sebanyak 221 perkara dari jumlah perkara yang ada sebanyak 259 perkara. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 85, 32% dan memperoleh capaian sebanyak 99,20 % . Hal ini menunjukkan bahwa Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 realisasi capaian sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2020-2024. Tercapainya target persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 karena penyelesaian perkara sesuai dengan SOP dan karena adanya pengawasan rutin yang dilakukan oleh panitera muda. di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 dikarenakan banyaknya perkara yang masuk diakhir tahun pada tahun 2020 sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan yaitu tahun 2021.

Tabel 9.2
*Perbandingan Persentase perkara **Perdata** yang diselesaikan tepat waktu*

| Tahun | jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan | jumlah perkara yang ada | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-------|---|-------------------------|------------|---------------|-------------|
| 2020 | 133 | 157 | 86%% | 84,71% | 98,5% |
| 2019 | 156 | 183 | 85,76% | 85,24% | 99,39% |

Tabel 9.3
*Perbandingan Persentase perkara **Pidana** yang diselesaikan tepat waktu*

| Tahun | jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan | jumlah perkara yang ada | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-------|---|-------------------------|------------|---------------|-------------|
| 2020 | 81 | 93 | 86% | 87,09% | 101,26% |
| 2019 | 119 | 135 | 85,76% | 88,14% | 102,78% |

Tabel 9.4
*Perbandingan Persentase perkara **Tipikor** yang diselesaikan tepat waktu*

| Tahun | jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan | jumlah perkara yang ada | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-------|---|-------------------------|------------|---------------|-------------|
| 2020 | 7 | 9 | 86% | 77,77% | 90,43% |
| 2019 | 1 | 1 | 85,76% | 100% | 116,60% |

❖ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk indikator ini adalah 36%, yang mengajukan upaya hukum sebanyak 150 perkara sedangkan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 71 perkara. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 32,13% dan capaiannya adalah 114,75% hal ini menunjukkan bahwa dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 capaian sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2020-2024. Tercapainya persentase target dikarenakan kinerja seluruh SDM yang terkait sesuai

dengan SOP serta kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Tabel 12.1 Evaluasi Tri Wulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

| Tahun | Tri Wulan | Putus Banding | Yang Mengajukan Upaya Hukum | Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum | Presentase (%) |
|-------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 2020 | I | 70 | 45 | 25 | 35.71% |
| | II | 126 | 86 | 40 | 31.75% |
| | III | 166 | 116 | 50 | 30.12% |
| | IV | 221 | 150 | 71 | 32.13% |
| 2019 | I | 77 | 35 | 42 | 54.55% |
| | II | 148 | 76 | 72 | 48.65% |
| | III | 212 | 119 | 93 | 43.87% |
| | IV | 270 | 159 | 111 | 41.11% |

Tabel 12.2 Evaluasi Tri Wulan Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

| Tahun | Tri Wulan | Putus Banding | Yang Mengajukan Upaya Hukum | Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum | Presentase (%) |
|-------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 2020 | I | 36 | 26 | 10 | 27.78% |
| | II | 70 | 47 | 23 | 32.86% |
| | III | 96 | 65 | 31 | 32.29% |
| | IV | 133 | 85 | 48 | 36.09% |
| 2019 | I | 48 | 21 | 27 | 56.25% |
| | II | 90 | 42 | 48 | 53.33% |
| | III | 124 | 65 | 59 | 47.58% |
| | IV | 155 | 84 | 71 | 45.81% |

Tabel 12.3 Evaluasi Tri Wulan Persentase perkara **Pidana** yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

| Tahun | Tri Wulan | Putus Banding | Yang Mengajukan Upaya Hukum | Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum | Presentase (%) |
|-------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 2020 | I | 32 | 19 | 13 | 40.63% |
| | II | 51 | 34 | 17 | 33.33% |
| | III | 63 | 44 | 19 | 30.16% |
| | IV | 81 | 58 | 23 | 28.40% |
| 2019 | I | 29 | 14 | 15 | 51.72% |
| | II | 58 | 34 | 24 | 41.38% |
| | III | 87 | 53 | 34 | 39.08% |
| | IV | 114 | 74 | 40 | 35.09% |

Tabel 12.4 Evaluasi Tri Wulan Persentase perkara **Tipikor** yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

| Tahun | Tri Wulan | Putus Banding | Yang Mengajukan Upaya Hukum | Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum | Presentase (%) |
|-------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 2020 | I | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
| | II | 5 | 5 | 0 | 0.00% |
| | III | 7 | 7 | 0 | 0.00% |
| | IV | 7 | 7 | 0 | 0.00% |
| 2019 | I | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | II | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | III | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| | IV | 1 | 1 | 0 | 0.00% |

Tabel 13.1
Perbandingan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 dan tahun 2019

| Tahun | Yang mengajukan upaya hukum | Tidak Mengajukan Upaya Hukum | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-------|-----------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 2020 | 150 | 71 | 28% | 32,13% | 114,75% |
| 2019 | 159 | 111 | 36% | 41.11% | 114.19% |

Grafik 4.
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi



Tabel 13.2
Perbandingan Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 dan tahun 2019

| Tahun | Yang mengajukan upaya hukum | Tidak Mengajukan Upaya Hukum | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-------|-----------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 2020 | 85 | 48 | 28% | 36.09% | 128,89% |
| 2019 | 84 | 71 | 36% | 45.81% | 127.25% |

Tabel 13.3
Perbandingan Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 dan tahun 2019

| Tahun | Yang mengajukan upaya hukum | Tidak Mengajukan Upaya Hukum | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-------|-----------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 2020 | 58 | 23 | 28% | 28.40% | 101,42% |
| 2019 | 74 | 40 | 36% | 35.09% | 97.47% |

Tabel 13.4
Perbandingan Persentase perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 dan tahun 2019

| Tahun | Yang mengajukan upaya hukum | Tidak Mengajukan Upaya Hukum | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-------|-----------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 2020 | 7 | 0 | 28% | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 1 | 0 | 36% | 0.00% | 0.00% |

d. Index Responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 mencapai nilai 97,61 / 3,90 hal tersebut melebihi target yang telah ditentukan, pencapaian Tahun sebelumnya juga melebihi target hal tersebut karena Seluruh SDM Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP dengan memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip 5R (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi perkara baik pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yaitu persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Tabel.14 Index responden Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

| |
|--|
| <p>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>Periode 1 Tahun 2020 NILAI : 97,61/3,90</p> <p>Dalam skala A (Sangat baik): 81,25 - 100 : 3,25 – 4,00</p> |
|--|

Tabel.15 Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2019 Semester II

| |
|--|
| INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 |
| Periode 2 Tahun 2019 |
| NILAI : 84,00/3,36 |
| Dalam skala A (Sangat baik): 81,25 - 100 : 3,25 – 4,00 |

Tabel.16 Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2019 Semester I

| |
|--|
| INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 |
| Periode 2 Tahun 2019 |
| NILAI : 80,64 /3,23 |
| Dalam skala B (Baik): 62,51 - 81,25: 2,51 - 3,25 |

Grafik 5.
Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Keterangan :

Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 mencapai nilai 97,65 hal tersebut melebihi target yang telah ditentukan, pencapaian Tahun sebelumnya juga melebihi target hal tersebut karena Seluruh SDM Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP dengan memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip 5R (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi perkara baik pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yaitu persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu , Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 17.
Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | URAIAN | TARGET 2020 | REALISASI 2020 | CAPAIAN 2020 | CAPAIAN 2019 |
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | - Perdata | | | | |
| | - Pidana | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | - Tipikor | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|
| | b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus (Tipikor) | 100% | 100% | 100% | 120% |
|--|---|------|------|------|------|

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :

a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Tabel 19.1

Evaluasi Tri Wulan

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

| Tahun | Tri Wulan | Jumlah Putusan | Jumlah Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | Persentase |
|-------|-----------|----------------|---|------------|
| 2020 | I | 70 | 70 | 100% |
| | II | 126 | 126 | 100% |
| | III | 166 | 166 | 100% |
| | IV | 221 | 221 | 100% |
| 2019 | I | 77 | 77 | 100% |
| | II | 148 | 148 | 100% |
| | III | 214 | 214 | 100% |
| | IV | 273 | 273 | 100% |

Tabel 19.2

Evaluasi Tri Wulan

*Persentase salinan putusan **Perdata** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu*

| Tahun | Tri Wulan | Jumlah Putusan | Jumlah Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | Persentase |
|-------|-----------|----------------|---|------------|
| 2020 | I | 36 | 36 | 100% |
| | II | 70 | 70 | 100% |
| | III | 96 | 96 | 100% |
| | IV | 133 | 133 | 100% |
| 2019 | I | 48 | 48 | 100% |
| | II | 90 | 90 | 100% |
| | III | 124 | 124 | 100% |
| | IV | 156 | 156 | 100% |

Tabel 19.3
Evaluasi Tri Wulan

*Persentase salinan putusan **Pidana** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu*

| Tahun | Tri Wulan | Jumlah Putusan | Jumlah Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | Persentase |
|-------|-----------|----------------|---|------------|
| 2020 | I | 32 | 32 | 100% |
| | II | 51 | 51 | 100% |
| | III | 63 | 63 | 100% |
| | IV | 81 | 81 | 100% |
| 2019 | I | 29 | 29 | 100% |
| | II | 58 | 58 | 100% |
| | III | 89 | 89 | 100% |
| | IV | 116 | 116 | 100% |

Tabel 19.4
Evaluasi Tri Wulan

*Persentase salinan putusan **Tipikor** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu*

| Tahun | Tri Wulan | Jumlah Putusan | Jumlah Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | Persentase |
|-------|-----------|----------------|---|------------|
| 2020 | I | 2 | 2 | 100% |
| | II | 5 | 5 | 100% |
| | III | 7 | 7 | 100% |
| | IV | 7 | 7 | 100% |
| 2019 | I | 0 | 0 | 100% |
| | II | 0 | 0 | 100% |
| | III | 1 | 1 | 100% |
| | IV | 1 | 1 | 100% |

Tabel 20.1

Perbandingan Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019, dan tahun 2020

| Tahun | Salinan yang dikirim ke pengadilan pengaju | Jumlah Putusan | Target | Realiasi | Capaian |
|-------------|--|----------------|--------|----------|---------|
| 2020 | 221 | 221 | 100% | 100% | 100% |
| 2019 | 273 | 273 | 100% | 100% | 100% |

Grafik 6.
Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu



Keterangan :

Target dalam indikator ini sebanyak 100 %, salinan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu sejumlah 221 dari 221 jumlah putusan sehingga Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100%. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2020-2024 realisasi sudah sesuai dengan target pada tahun 2020, dan capaian 100% juga diraih pada tahun 2019 hal ini disebabkan karena SDM yang terkait bekerja sesuai dengan SOP dan adanya pantauan secara rutin oleh Panitera Muda.

Tabel 20.2

*Perbandingan Persentase salinan putusan **Perdata** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019, dan tahun 2020*

| Tahun | Salinan yang dikirim ke pengadilan pengaju | Jumlah Putusan | Target | Realiasi | Capaian |
|-------|--|----------------|--------|----------|---------|
| 2020 | 133 | 133 | 100% | 100% | 100% |
| 2019 | 156 | 156 | 100% | 100% | 100% |

Tabel 20.3

*Perbandingan Persentase salinan putusan **Pidana** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019, dan tahun 2020*

| Tahun | Salinan yang dikirim ke pengadilan pengaju | Jumlah Putusan | Target | Realiasi | Capaian |
|-------|--|----------------|--------|----------|---------|
| 2020 | 81 | 81 | 100% | 100% | 100% |
| 2019 | 116 | 116 | 100% | 100% | 100% |

Tabel 20.4

*Perbandingan Persentase salinan putusan **Tipikor** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019, dan tahun 2020*

| Tahun | Salinan yang dikirim ke pengadilan pengaju | Jumlah Putusan | Target | Realiasi | Capaian |
|-------|--|----------------|--------|----------|---------|
| 2020 | 7 | 7 | 100% | 100% | 100% |
| 2019 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |

- b. Persentase putusan perkara Tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tabel 21.
Evaluasi Tri Wulan Tahun 2019-2020
Persentase putusan perkara Tipikor yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

| Tahun | Tri Wulan | Jumlah isi putusan perkara tipikor yang di upload dalam website | Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus | Persentase |
|-------|-----------|---|--|------------|
| 2020 | I | 2 | 2 | 100% |
| | II | 5 | 5 | 100% |
| | III | 7 | 7 | 100% |
| | IV | 7 | 7 | 100% |
| 2019 | I | 0 | 0 | 100% |
| | II | 0 | 0 | 100% |
| | III | 1 | 1 | 100% |
| | IV | 1 | 1 | 100% |

Tabel 22.
Perbandingan Persentase putusan perkara Tipikor yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

| Tahun | Jumlah isi putusan perkara yang di upload dalam website | Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|---|--|--------|-----------|---------|
| 2020 | 7 | 7 | 100% | 100% | |
| 2019 | 1 | 1 | | 100% | |

Grafik 7.
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus



Keterangan :

persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dapat direalisasikan pada tahun 2020 adalah 100% maka capaian kinerjanya 100% dari target yang ditetapkan. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2020-2024 realisasi sudah sesuai dan melebihi dengan target pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 . Tercapainya target dikarenakan sarana dan prasarana yang mendukung serta terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait dalam penerbitan amar putusan secara online.

Gambar 3. Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 4.
Tampilan Aplikasi Informasi Perkara pada Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 5. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Perdata

The screenshot shows the 'Daftar Perkara Perdata PT' (Civil Case List) page. It features a search bar and a table with the following columns: No, No Perkara, Pengadilan Banding, No/Status Perkara, Status Perkara, and Detail. The table contains four rows of case data.

| No | No Perkara | Pengadilan Banding | No/Status Perkara | Status Perkara | Detail |
|----|--|--|-------------------|----------------------------------|--------|
| 1 | No Perkara PT : S/PT/2020/PT/YK No Perkara PB : S/PT/2020/PT/YK | Ajal PB : PA Ganesa Tanggal Penyerahan : 28 Februari 2020 | | Status Perkara: Setoran Putus | Detail |
| 2 | No Perkara PT : S/PT/2020/PT/YK No Perkara PB : S/PT/2020/PT/YK | Ajal PB : PA Ganesa Tanggal Penyerahan : 28 Februari 2020 | | Status Perkara: Setoran Putus | Detail |
| 3 | No Perkara PT : S/PT/2020/PT/YK No Perkara PB : S/PT/2020/PT/YK | Ajal PB : PA Ganesa Tanggal Penyerahan : 28 Februari 2020 | | Status Perkara: Setoran Putus | Detail |
| 4 | No Perkara PT : S/PT/2020/PT/YK No Perkara PB : S/PT/2020/PT/YK | Ajal PB : PA Ganesa Tanggal Penyerahan : 28 Februari 2020 | | Status Perkara: Setoran Putus | Detail |

Gambar 6. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Pidana

| No | No Perkara | Permiswaan, Banding | Hasil Band Perkara | Status | Detail |
|----|---|--|--------------------|--|--------|
| 1 | No Perkara PT : S/PT/2018/PT/VI No Perkara PM : 250/PAL/2018/PM/BI | Asal PM : PM Suman Tanggal Permiswaan : 14 Desember 2018 | Pengiriman | Status Putus: Sudah Putus | Detail |
| 2 | No Perkara PT : S/PT/2018/PT/VI No Perkara PM : 245/PAL/2018/PM/BI | Asal PM : PM Sumbul Tanggal Permiswaan : 14 Desember 2018 | Pengiriman | Status Putus: Sudah Putus | Detail |
| 3 | No Perkara PT : S/PT/2018/PT/VI No Perkara PM : 245/PAL/2018/PM/BI | Asal PM : PM Sumbul Tanggal Permiswaan : 27 November 2018 | Tindak Pidana Lain | Status Putus: Sudah Putus Tanggal Putus: 29 Januari 2019 Awar Singkat : Membuat Dok. Putusan : Download | Detail |

Gambar 7. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Tipikor

| No | No Perkara | Permiswaan, Banding | Hasil Band Perkara | Status | Detail |
|----|--|--|-----------------------|---|--------|
| 1 | No Perkara PT : S/PT/2018-TPK/2018/PT/VI No Perkara PM : 25/PT.Sca-TPK/2018/PM/VI | Asal PM : Pengadilan Tipikor & PM Yogyakarta Tanggal Permiswaan : 06 Agustus 2018 | Tindak Pidana Korupsi | Status Putus: Sudah Putus Tanggal Putus: 12 Oktober 2018 Awar Singkat : Mengadilan Dok. Putusan : Download | Detail |
| 2 | No Perkara PT : S/PT/2018-TPK/2018/PT/VI No Perkara PM : 23/PT.Sca-TPK/2018/PM/VI | Asal PM : Pengadilan Tipikor & PM Yogyakarta Tanggal Permiswaan : 15 Juli 2018 | Tindak Pidana Korupsi | Status Putus: Sudah Putus Tanggal Putus: 04 Oktober 2018 Awar Singkat : Mengadilan Dok. Putusan : Download | Detail |

Selain melalui melalui www.pt-yogyakarta.go.id pada menu informasi perkara, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam rangka keterbukaan informasi juga telah melaksanakan berbagai program yaitu :

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Gambar 8. Tampilan Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 9. Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Perdata

The screenshot shows the 'Peta SIPP Versi 3 Perkara Perdata' website. The main heading is 'DAFTAR PERKARA PERDATA'. Below the heading, there is a search bar and a table of cases. The table has the following columns: 'No. Putusan', 'Nama Pengadilan', 'Nama Pengadilan', 'No. Putusan PT', 'No. Putusan PT', 'Jenis Perkara', 'Tgl. Pendaftaran Perkara', and 'Tgl. Pengantar Perkara ke Pengadilan'. The table contains 8 rows of data, each representing a different civil case.

| No. Putusan | Nama Pengadilan | Nama Pengadilan | No. Putusan PT | No. Putusan PT | Jenis Perkara | Tgl. Pendaftaran Perkara | Tgl. Pengantar Perkara ke Pengadilan |
|-------------|------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | PERKADILAH HECER- YOGYAKARTA | Kuasa Pengadilan- Pengadilan PT. 1033/PTONKOR.2/14 | 41/PT/2013/PT/14 | 11/PT/2014/PT/14 | Dokum. Pengadilan | 01 Dec 2013 | 03 Feb 2014 |
| 2 | PERKADILAH HECER- WONOSARI | Pengadilan PA. 1033/PTONKOR.2/14 | 02/PT/2013/PT/14 | 4/PT/2014/PT/14 | Perkawinan | 14 Nov 2013 | 16 Jan 2014 |
| 3 | PERKADILAH HECER- CIBINAYA | Teknologi. 1033/PTONKOR.2/14 | 44/PT/2013/PT/14 | 11/PT/2014/PT/14 | Wardah | 13 Jan 2014 | 04 Sep 2014 |
| 4 | PERKADILAH HECER- SOREH | Kuasa Pengadilan- 1033/PTONKOR.2/14 | 88/PT/2013/PT/14 | 10/PT/2014/PT/14 | Perkawinan | 08 Dec 2013 | 20 Nov 2014 |
| 5 | PERKADILAH HECER- SLEMAN | Kuasa Pengadilan- 1033/PTONKOR.2/14 | 103/PT/2013/PT/14 | 10/PT/2014/PT/14 | Perkawinan | 06 Oct 2013 | 03 Nov 2014 |
| 6 | PERKADILAH HECER- WONOSARI | Kuasa Pengadilan- 1033/PTONKOR.2/14 | 11/PT/2013/PT/14 | 11/PT/2014/PT/14 | Perkawinan | 05 Dec 2013 | 04 Dec 2014 |
| 7 | PERKADILAH HECER- YOGYAKARTA | Kuasa Pengadilan- 1033/PTONKOR.2/14 | 14/PT/2013/PT/14 | 15/PT/2014/PT/14 | Perkawinan | 21 Dec 2013 | 12 Nov 2014 |
| 8 | PERKADILAH HECER- SLEMAN | Kuasa Pengadilan- 1033/PTONKOR.2/14 | 22/PT/2013/PT/14 | 2/PT/2014/PT/14 | Dokum. Pengadilan | 27 Dec 2013 | 10 Jan 2014 |

B. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah dilakukan pembinaan, koordinasi, monitoring secara berjenjang dan berkala, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2018, 2019 dan Tahun Anggaran 2020 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 23.

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018,2019 dan 2020

| NO. | JENIS BELANJA | TAHUN 2018 | | | TAHUN 2019 | | | TAHUN 2020 | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | | PAGU DIPA | REALISASI | SISA DANA | PAGU DIPA | REALISASI | SISA DANA | PAGU DIPA | REALISASI | SISA DANA | | | |
| | | Rp | Rp | % | Rp | Rp | % | Rp | Rp | % | Rp | | |
| 1 | PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DIPA | | | | | | | | | | | | |
| | B. Pegawai | 31,943,095,000 | 31,942,746,009 | 100.00% | 348,991 | 35,279,775,000 | 35,262,861,321 | 99.95% | 16,913,679 | 32,853,739,000 | 32,833,297,870 | 99.94% | 20,441,130 |
| | B. Barang Opr | 1,700,507,000 | 1,699,910,266 | 99.96% | 596,734 | 2,027,595,000 | 2,013,650,538 | 99.31% | 13,944,462 | 3,030,778,000 | 3,030,563,408 | 99.99% | 214,592 |
| | B. Barang Non Opr | 130,608,000 | 130,399,636 | 99.84% | 208,364 | 37,700,000 | 37,300,000 | 98.94% | 400,000 | 229,958,000 | 229,904,601 | 99.98% | 53,399 |
| | B. Modal | 552,690,000 | 552,650,412 | 99.99% | 39,588 | 209,500,000 | 208,144,000 | 99.35% | 1,356,000 | 104,335,000 | 103,840,000 | 99.53% | 495,000 |
| | Jumlah 01 | 34,326,900,000 | 34,325,706,323 | 99.99% | 1,193,677 | 37,554,570,000 | 37,521,955,859 | 99.91% | 32,614,141 | 36,218,810,000 | 36,197,605,879 | 99.94% | 21,204,121 |
| | B. Barang 03 | 130,618,000 | 129,251,400 | 98.95% | 1,366,600 | 108,585,000 | 102,787,300 | 94.66% | 5,797,700 | 190,525,000 | 190,065,900 | 99.76% | 459,100 |
| | Jumlah 03 | 130,618,000 | 129,251,400 | 98.95% | 1,366,600 | 108,585,000 | 102,787,300 | 94.66% | 5,797,700 | 190,525,000 | 190,065,900 | 99.76% | 459,100 |

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terdapat penurunan penyerapan anggaran sebesar 0.01% untuk belanja pegawai karena banyaknya mutasi masuk hakim dan pegawai pada tahun 2020.

2. Belanja Barang Operasional

Belanja barang operasional mengalami kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0,68% karena adanya kegiatan antisipasi penularan covid-19 dengan melakukan pemeriksaan swab terhadap seluruh pegawai pada tahun 2020.

3. Belanja Barang Non Operasional

Untuk belanja barang non operasional mengalami kenaikan penyerapan anggaran sebesar 1,04% karena adanya pelaksanaan kegiatan BIMTEK Kepaniteraan maupun Kesekretariatan di tahun 2020 dan penarikan dana BIMTEK dari pusat untuk penanggulangan covid.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0,18% untuk belanja modal

karena pada tahun lalu 2018 Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mendapatkan anggaran belanja modal.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Belanja Barang

Terjadi Penurunan penyerapan anggaran sebesar 5,1% untuk belanja barang pada program peningkatan manajemen peradilan (di badan peradilan umum) karena terbatasnya beberapa pelaksanaan kegiatan disebabkan pandemi covid serta menurunnya volume perkara dan para pencari keadilan pada tahun 2020.

C. PELAKSANAAN SAKIP

Seiring dengan tujuan manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratus dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun komponen-komponen SAKIP antara lain :

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Rencana Strategis (Renstra)
- c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- d. Perjanjian Kinerja (PKT)
- e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- f. Rencana Aksi (Rensi)
- g. Program Kerja

Pada Periode 2020, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se D.I.Yogyakarta telah melakukan penilaian sebagai berikut :

| No | Satuan Kerja | LKjIP 2016 | | LKjIP 2017 | | LKjIP 2018 | | LKjIP 2019 | |
|----|----------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | | score | Nilai | score | Nilai | score | Nilai | score | Nilai |
| 1. | PT. Yogyakarta | 76,23 | BB | 76,70 | BB | 77,08 | BB | 78,26 | BB |
| 2. | PN Yogyakarta | 72,92 | B | 74,23 | B | 77,63 | BB | 70,64 | BB |
| 3. | PN Sleman | 71,30 | B | 69,57 | B | 74,11 | B | 71,59 | BB |
| 4. | PN Bantul | 71,41 | B | 72,81 | B | 77,35 | BB | 73,24 | BB |
| 5. | PN Wates | 72,18 | B | 73,22 | B | 75,1 | BB | 75,79 | BB |
| 6. | PN Wonosari | 71,71 | B | 72,24 | B | 76,02 | BB | 77,03 | BB |

Berdasarkan data diatas, nilai LKjIP Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se D.I.Yogyakarta meskipun terdapat sakter tingkat pertama yang mengalami penurunan nilai akan tetapi sebagian besar satker tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta mengalami peningkatan. Hal ini dapat terjadi karena hasil pembinaan dari tingkat Banding Ke Tingkat pertama berjalan lancar.



BAB IV PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 ini memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama kurun waktu Tahun 2020 yang dituangkan dalam 2 (dua) program beserta sasaran dan targetnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta, karena laporan ini melaporkan suatu Pencapaian Kinerja selama Tahun 2020 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis. Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun yang akan datang.

B. SARAN

1. Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 diharapkan agar terwujud suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama yang dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif dan akuntabel.
3. Optimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja dan kelayakan LKjIP dengan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP lebih optimal).



BAB V LAMPIRAN



BAB V - LAMPIRAN

1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2020
3. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020
5. Rencana Kinerja Tahun 2020
6. SK Penyusunan LKjIP Tahun 2020
7. SK Tim Penyusun RENSTRA tahun 2020-2024
8. SK Tim Evaluasi dan Monev LKjIP Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020
9. Penghargaan yang telah diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020

TABEL 24. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA 2020

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana khusus Tipikor | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk.Banding pada empat (empat) lingkungan peradilan. • sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera |
| | | c. Persentase perkara | | Panitera | Laporan |

| | | | | | |
|---|---|--|---|----------|---|
| | | <p>yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi | <p><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | | <p>Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| | | <p>d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. | panitera | <p>Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan</p> |
| 2 | <p>Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</p> | <p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p> | <p><u>Jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju</u>X100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Diputus</p> <p>Catatan : SEMA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan</p> | Panitera | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| | | <p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online</p> | <p>Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: right;">X100%</p> | Panitera | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| | | <p>secara online</p> | <p>Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat</p> | | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|
| | | dalam waktu 1 hari setelah diputus | Catatan : <ul style="list-style-type: none">• One Day Publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dalam satu hari setelah diputus• Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish | | |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|

TABEL 25.
REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN
TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|------------------------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor | 100% 100% 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor | 86% 86% 86% |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Kasasi | 36% |
| | | d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 85% |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana | 100% 100% |
| | | b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100% |

**TABEL 26. REVIU PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | |
| | | - Perdata | 100% |
| | | - Pidana | 100% |
| | | - Pidana Khusus Tipikor | 100% |
| b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | - Perdata | 86% | |
| | - Pidana | 86% | |
| | - Pidana Khusus Tipikor | 86% | |
| c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : | - Kasasi | 36% | |
| | d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 85% | |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | 100% |
| | | - Perdata | 100% |
| | | - Pidana | |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100% |

**TABEL 27. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | | |
|----|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | URAIAN | TARGET 2020 | REALISASI 2020 | CAPAIAN 2020 |
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% |
| | | b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor | 86% 86% 86% | 84,71% 87,09% 77,77% | 98,5% 101,26% 90,43% |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Kasasi | 36% | 32,12% | 89,22% |
| | | d. Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 85% | 97,65% | 114,88% |
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|--|--|---|------|------|------|
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100% | 100% | 100% |
|--|--|---|------|------|------|

Tabel.28 MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 – 2024.

- Tujuan : 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

| NO | TUJUAN | INDIKATOR | TAR GET | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | | | | | STRATEGI | | | Anggaran |
|----|---|-----------|------------|--|--|--------|------|------|------|------|--|--------------------------------------|--|------------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | KEBIJAKAN | PROGRAM | KEGIATAN | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | | | 1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus - Tipikor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan penyelesaian putusan perkara | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Penyelesaian sisa perkara perdata, pidana dan tipikor | 71.805.000 |
| | | | | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus - Tipikor | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor tepat waktu | |
| | | | | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Kasasi | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan kualitas putusan perkara banding | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----|--|------|------|------|------|------|---|--|--|-------------|
| | | | | | d. | Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 85% | 86% | 86% | 87% | 87% | | | Mengumpulkan respon dari para pencari keadilan/ masyarakat melalui proses survey (Survey/ Index Kepuasan Masyarakat) | |
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | | | 2.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. | Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu | 118.720.000 |
| | | | | | b. | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Pengembangan sistem Informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik | Program peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan Peradilan | Publikasi putusan perkara dalam waktu 1 hari setelah diputus | |



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :W13.U / 24 / SK / KPT / 1 / 2021

Tentang

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terselenggaranya Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
- Kesatu : Menunjuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Ketiga : Bahwa hal-hal yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2021





PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : W.13.U / 25 / SK / KPT/ I /2021

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : SK Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Hasil Rapat Tim Revisi indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembahasan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Revisi Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyesuaikan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 6 Januari 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



(SUBIPTO S.H., M.H.)

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | <p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Khusus TIPIKOR | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan • Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Khusus TIPIKOR | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|--|---|----------|--|
| | | <p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasasi | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>d. Index responden Peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Peradilan tingkat banding</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permenn PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,5 dengan nilai konversi interval IKM Index harus \geq 80. | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
| 2. | <p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p> | <p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana | $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p> | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • One day publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dalam 1 hari setelah diputus • Mahkamah MA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :W13.U/166 /SK/KPT/1/2021

Tentang

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2010-2035;
b. Bahwa dengan telah disusunnya Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
- Kesatu : Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum
dalam surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang
digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk
menetapkan rencana kinerja, menyampaikan rencana kinerja
dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas, serta melakukan evaluasi,
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Kedua : Rencana Strategis Tahun 2020-2024 disampaikan kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Januari 2021

KETUA
K. SURIPTO, S.H., M.H.





PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :W13.U / 27 / SK / KPT / 1 / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 27 Nopember 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk dapat terselenggaranya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2020.
- Kesatu : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020.
- Ketiga : Bahwa hal-hal yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta
Pada tanggal 6 Januari 2021



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor : W13.U/PT/ISK/KPT/II/2021
Tanggal : 6 Januari 2021

TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020

| No | JABATAN | TUGAS/ WEWENANG |
|----|--|--------------------|
| 1 | Ketua | Penanggungjawab |
| 2 | Wakil | Ketua Tim |
| 3 | Panitera | Koordinator |
| 4 | Sekretaris | Sekretaris |
| 5 | Panitera Muda Perdata | Anggota |
| 6 | Panitera Muda Pidana | Anggota |
| 7 | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 8 | Panitera Muda Tipikor | Anggota |
| 9 | Kabag Umum dan Keuangan | Anggota |
| 10 | Kabag Perencanaan dan Kepegawaian | Anggota |
| 11 | Kasubbag Rencana Program dan Anggaran | Anggota |
| 12 | Kasubbag Keuangan dan Pelaporan | Anggota |
| 13 | Kasubbag Kepegawaian dan TI | Anggota |
| 14 | Kasubbag TU dan RT | Anggota |
| 15 | Analisis Perkara Pengadilan Kepaniteraan Hukum | Operator |
| 16 | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | Operator |



KETUA

SURIPTO, S.H., M.H



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : W13.U / 20 / SK / KPT / I / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2020,
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021,
SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terselenggaranya monitoring dan evaluasi (Monev) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, serta Rencana Kinerja Tahun 2022 pada pengadilan Tinggi Yogyakarta secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, serta Rencana Kinerja Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- b. Bahwa mereka yang Namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Dikum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20 A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2020, DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021, SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA.**
- Kesatu** : **Menunjuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP) pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan Rencana Kinerja Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.**

- Kedua : Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan Rencana Kinerja Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Ketiga : Bahwa hal-hal yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Januari 2021


KETUA
SURIPTO, S.H., M.H

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor : W13.U/ 49 /SK/KPT/I/2021
Tanggal : 15 Januari 2021

TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2020,
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021,
SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2022
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

| No | NAMA | TUGAS/WEWENANG |
|----|--|----------------|
| 1 | Ketua | Pembina |
| 2 | Wakil Ketua | Pengarah |
| 3 | Panitera | Koordinator |
| 4 | Sekretaris | Sekretaris |
| 5 | Panitera Muda Hukum | Evaluator |
| 6 | Panitera Muda Pidana | Anggota |
| 7 | Panitera Muda Perdata | Anggota |
| 8 | Panitera Muda TIPIKOR | Anggota |
| 9 | Kabag Umum dan Keuangan | Anggota |
| 10 | Kabag Perencanaan dan Kepegawaian | Anggota |
| 11 | Kasubbag Kepegawaian dan IT | Anggota |
| 12 | Kasubbag Keuangan dan Pelaporan | Anggota |
| 13 | Kasubbag TU dan RT | Anggota |
| 14 | Kasubbag Rencana Program dan Anggaran | Evaluator |
| 15 | Analisis Perkara Pengadilan Kepaniteraan Hukum | Operator |
| 16 | Pengelola Perkara Kepaniteraan Hukum | Anggota |
| 17 | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | Evaluator |



KETUA

SURIPTO, S.H., M.H



**PENGHARGAAN YANG
DITERIMA PENGADILAN
TINGGI YOGYAKARTA**

2020

MENDAPATKAN AKREDITASI “A” (EXCELLENT)



**PERINGKAT TERBAIK KE II SE DIY
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK**



**PENGHARGAAN TERHADAP
PELAKSANAAN E COURT SECARA PENUH
SESUAI DENGAN PERMA NO 3 TAHUN 2018**



NILAI LKjIP PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2017



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 13011
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

Jakarta, 7 Desember 2018

Nomor : 1770/BP/Eks/12/2018
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

7049

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Wojo Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. - Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100.
Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban "Tidak" akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgment evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

| Jawaban | Kriteria | Nilai |
|---------|--|-------|
| a | Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%) | 1 |
| b | Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%) | 0,75 |
| c | Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%) | 0,50 |
| d | Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%) | 0,25 |

| | | |
|---|--|---|
| e | Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%) | 0 |
|---|--|---|

4. Pengadilan Tinggi Yogyakarta memperoleh nilai sebesar **76,70 (BB)** atau **Sangat Baik**.
5. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Perencanaan Kinerja = Bobot 30% nilai yang diperoleh 24,59%:**
 - 1) Dokumen Renstra 2015-2019 telah disusun, dan telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah.
 - 2) Tujuan dan sasaran pada Renstra sudah berorientasi pada hasil, program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program, serta Renstra sudah menyajikan IKU.
 - 3) Indikator kinerja tujuan dan sasaran sudah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, namun target kinerja pada renstra belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
 - 4) Dokumen Renstra sudah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya, serta telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi).
 - 5) Pada implementasi renstra, dokumen renstra sudah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, serta sudah direviu secara berkala.
 - 6) Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan, sasaran sudah berorientasi pada hasil, serta target dalam dokumen RKT telah digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran.
 - 7) RKT telah menyajikan IKU, indikator kinerja sasaran dan kegiatan sudah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, namun target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
 - 8) Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK), dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja/satker dibawahnya, dan telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA).
 - 9) Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek, sasaran telah berorientasi pada hasil, indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, namun target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
 - 10) Dokumen PK belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala.
 - b. **Pengukuran Kinerja = Bobot 25% nilai yang diperoleh 19,11%:**
 - 1) Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
 - 2) Pada kualitas pengukuran, IKU sudah dapat diukur secara objektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur, cukup untuk mengukur kinerja, dan sudah dapat diukur realisasinya.
 - 3) Indikator kinerja sasaran sudah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur, cukup untuk mengukur sasaraannya, serta telah diukur realisasinya.

- 4) Pengumpulan data kinerja sudah dapat diandalkan namun belum sepenuhnya dilakukan secara berkala.
- 5) Pada implementasi pengukuran, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 6) Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja= Bobot 15% nilai yang diperoleh **12,00%**:

- 1) LKjIP sudah menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, dan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi pada *output/outcome*, namun belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.
- 2) LKjIP sudah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan sehingga informasi kinerja dalam LKjIP dapat diandalkan, serta LKjIP telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.
- 3) Informasi yang disajikan dalam LKjIP telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker.

d. Evaluasi Internal = Bobot 10% nilai yang diperoleh **7,67%**:

- 1) Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja, dan terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
- 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja dibawahnya telah dilakukan, serta hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB, dan dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi namun belum sepenuhnya disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap.
- 4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sudah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja, serta untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

e. Pencapaian Kinerja= Bobot 20% nilai yang diperoleh **13,33%**:

Target kinerja *output/outcome* telah dapat dicapai, capaian kinerja *output/outcome* lebih baik dari tahun sebelumnya, namun informasi mengenai kinerja *output/outcome* belum sepenuhnya dapat diandalkan.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hal di atas direkomendasikan:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Target kinerja pada Renstra, RKT dan PK agar ditetapkan dengan baik
- 2) Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Pengumpulan data kinerja agar dilakukan secara berkala.
- 2) Hasil pengukuran kinerja agar digunakan untuk pengendalian dan

pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja pada LKJIP agar disajikan dengan uraian yang lebih mendalam terutama mengenai faktor-faktor yang mendukung ataupun menghambat capaian kinerja serta cara untuk mengatasinya.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja agar disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap, sehingga hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi.

e. Pencapaian Kinerja

Dalam merumuskan sasaran dan indikator agar memperhatikan target yang telah ditetapkan, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pengadilan sehingga uraian pelaksanaan kegiatan dan proses yang telah dilakukan menggambarkan kinerja atau outcome yang memadai dan capaian serta peningkatan kinerja satker.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2017, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

NUGROHO SETIADJI

Tembusan Yth:

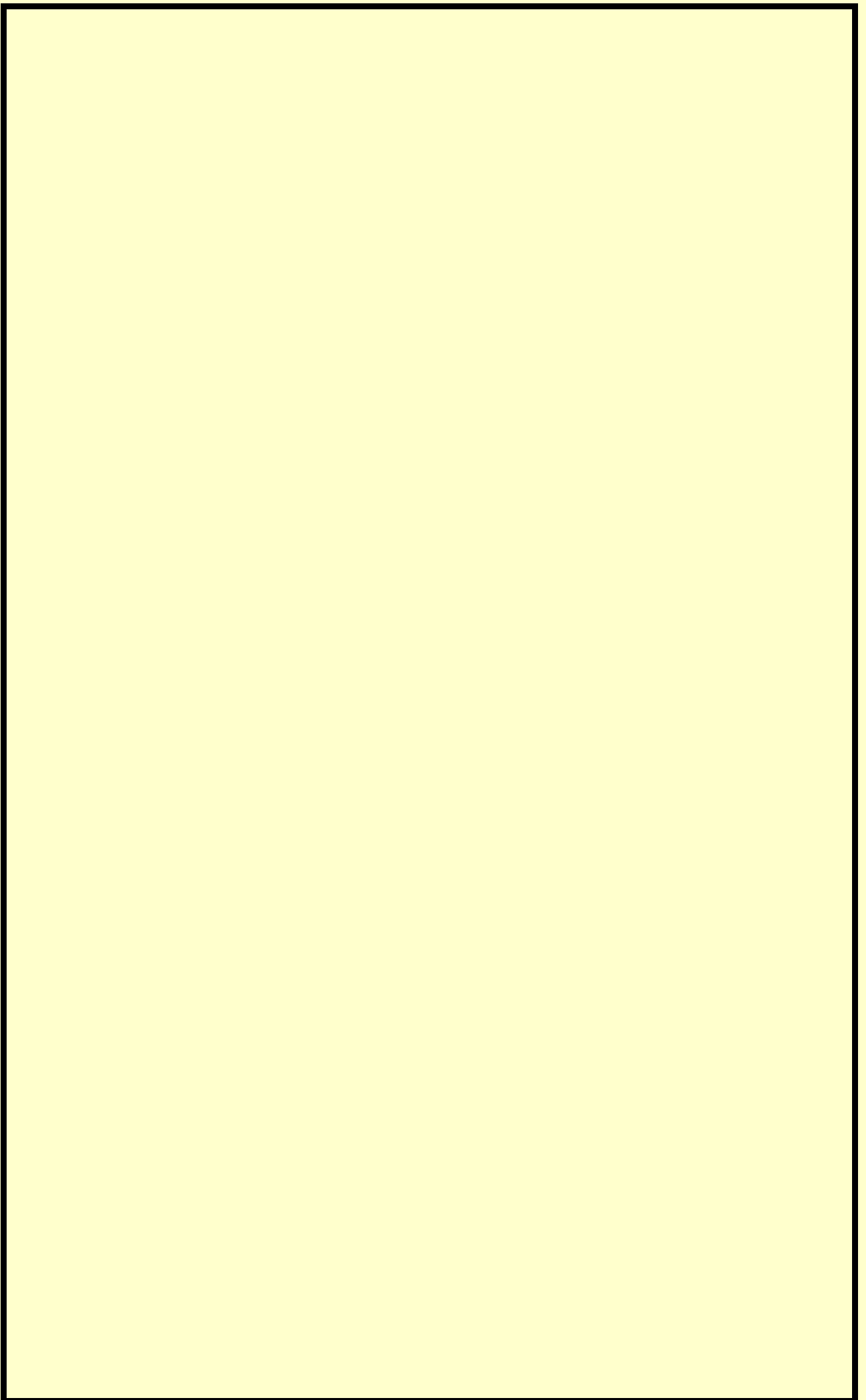
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kementerian PAN dan RB

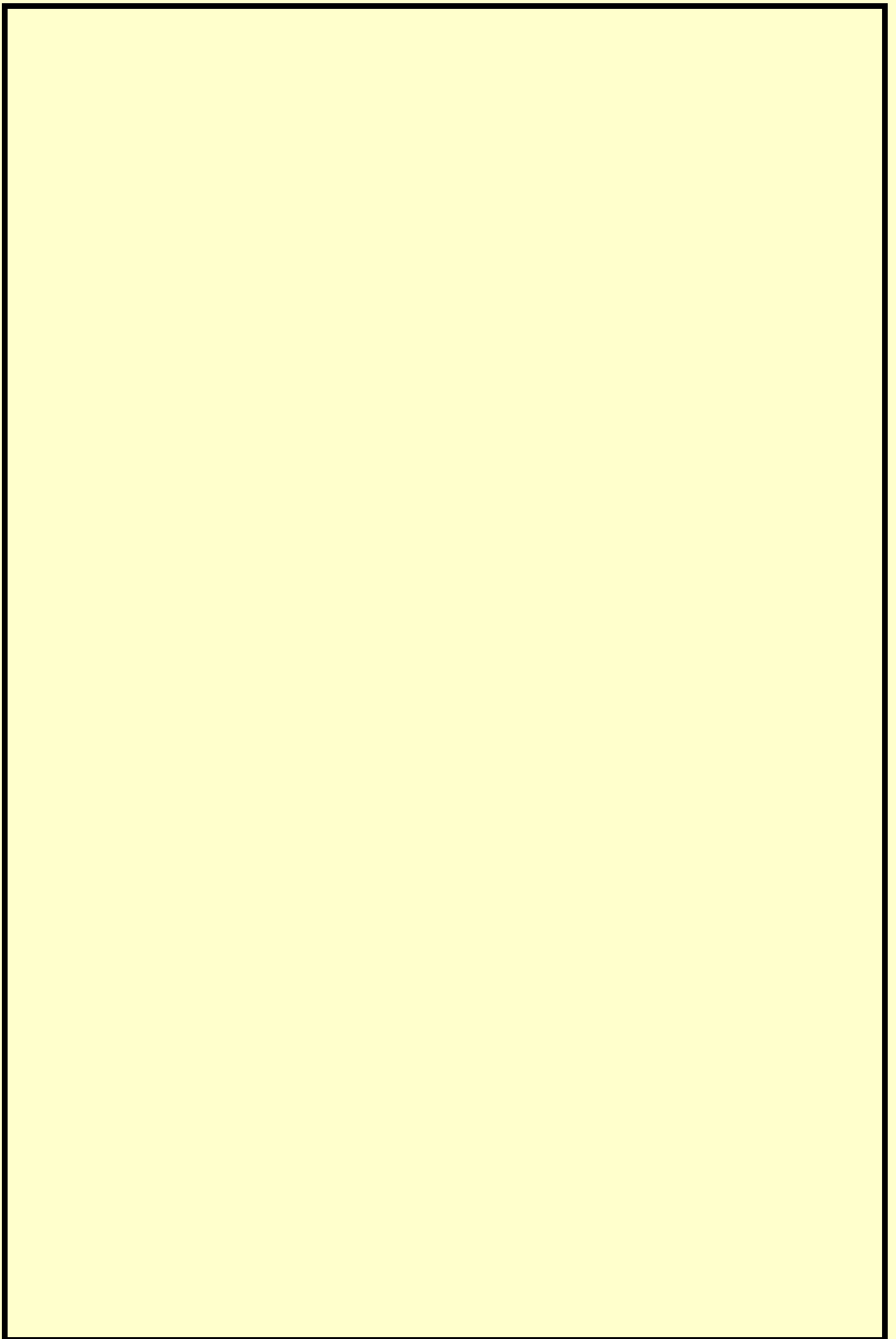
**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TAHUN : 2017**

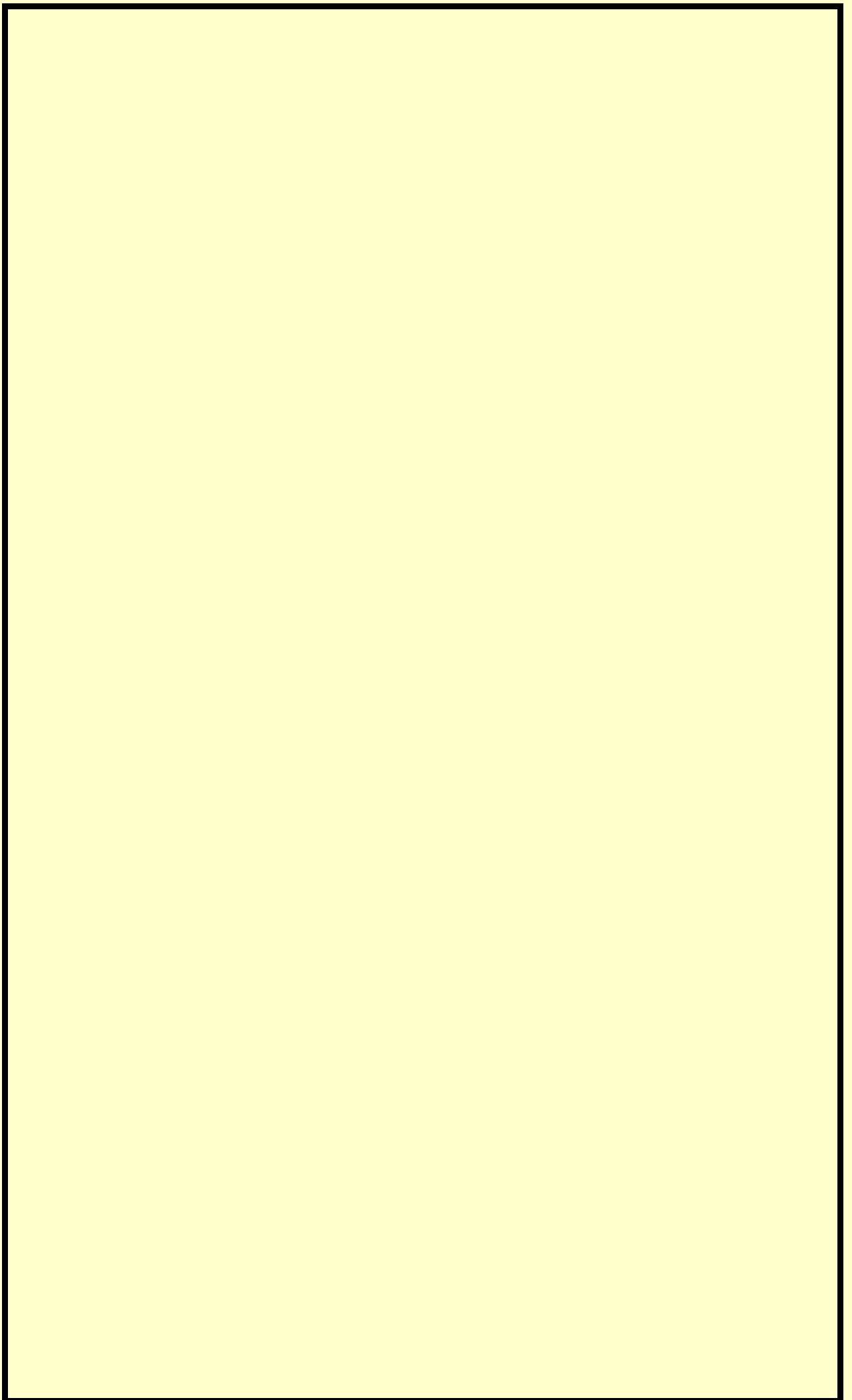
| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN/BOBOT (%) | UNIT KERJA | | TOTAL |
|--|--|------------|-------|--------------|
| | | Y/T | NILAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. PERENCANAAN KINERJA (30%) | | | | 24,59 |
| I. RENCANA STRATEGIS (10%) | | | | 8,38 |
| a. PEMENUHAN RENSTRA (2%) | | | | |
| 1 | Dokumen Renstra telah ada | y | 1 | 1,00 |
| 2 | Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah | a | 1 | 1,00 |
| | | | | 2,00 |
| b. KUALITAS RENSTRA (5%) | | | | |
| 3 | Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil | b | 0,75 | 0,54 |
| 4 | Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program | b | 0,75 | 0,54 |
| 5 | Renstra telah menyajikan IKU | a | 1 | 0,71 |
| 6 | Indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | b | 0,75 | 0,54 |
| 7 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | c | 0,5 | 0,36 |
| 8 | Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya | b | 0,75 | 0,54 |
| 9 | Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) | b | 0,75 | 0,54 |
| | | | | 3,75 |
| c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) | | | | |
| 10 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan | a | 1 | 0,75 |
| 11 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra unit kerja/satker dibawahnya | b | 0,75 | 0,56 |
| 12 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran | b | 0,75 | 0,56 |
| 13 | Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala | a | 1 | 0,75 |
| | | | | 2,63 |
| II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7,5%) | | | | 6,34 |
| a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1,5%) | | | | |
| 1 | Dokumen RKT telah ada | y | 1 | 0,50 |
| 2 | Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA | y | 1 | 0,50 |
| 3 | Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan | a | 1 | 0,50 |
| | | | | 1,50 |
| b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3,75%) | | | | |
| 4 | Sasaran telah berorientasi hasil | b | 0,75 | 0,47 |
| 5 | Target dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran | b | 0,75 | 0,47 |
| 6 | RKT telah menyajikan IKU | a | 1 | 0,63 |
| 7 | Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | b | 0,75 | 0,47 |
| 8 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | c | 0,5 | 0,31 |
| 9 | Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra | a | 1 | 0,63 |
| | | | | 2,97 |
| c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2,25%) | | | | |
| 10 | Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK) | a | 1 | 0,75 |
| 11 | Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja/satker dibawahnya | b | 0,75 | 0,56 |
| 12 | Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (a.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA) | b | 0,75 | 0,56 |
| | | | | 1,88 |

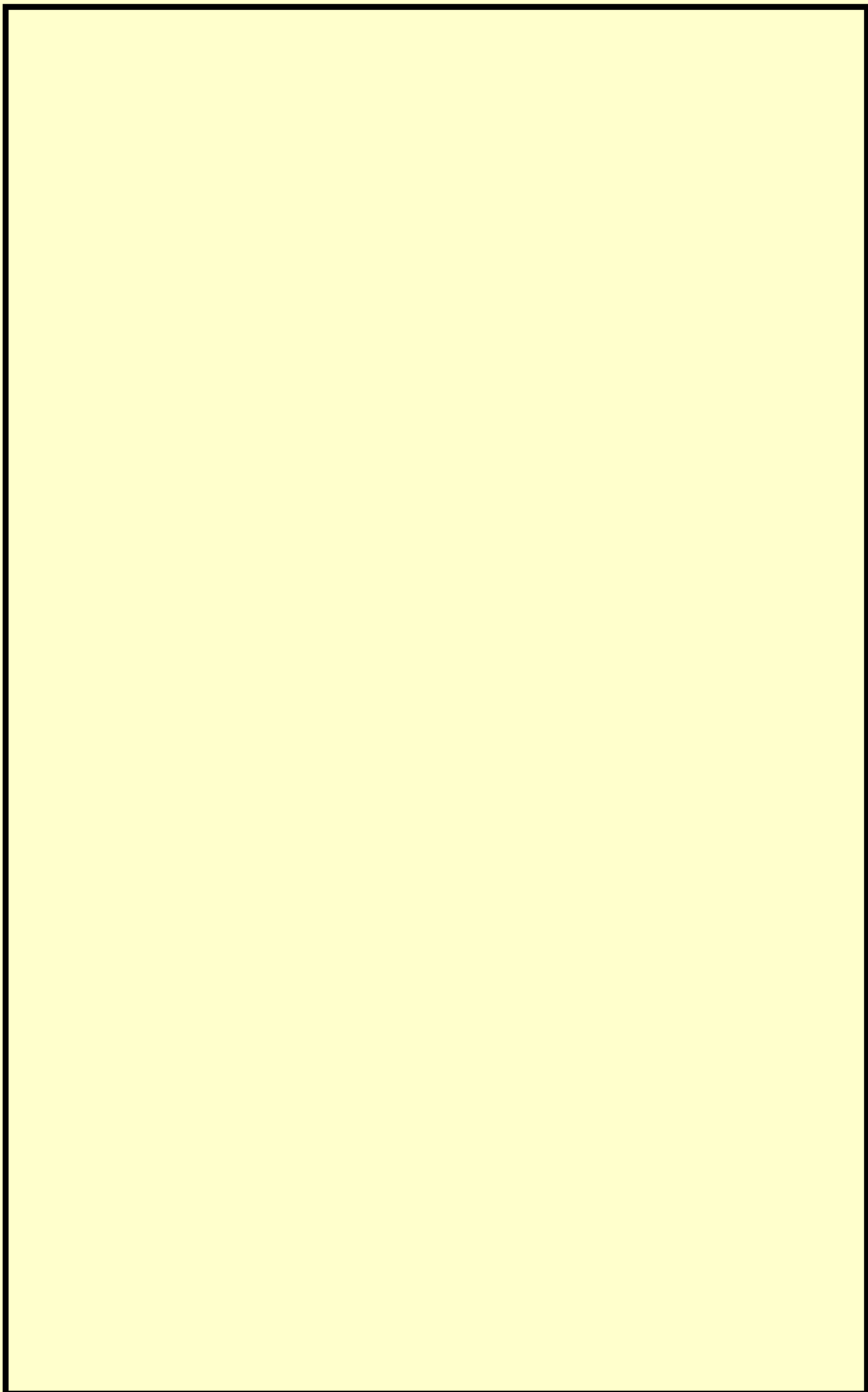
| | | | | |
|---|---|---|------|--------------|
| III. DOKUMEN PERJANIAN KINERJA (12,5%) | | | | 9,87 |
| a. PEMENUHAN PK (2%) | | | | |
| 1 | Dokumen PK unit kerja telah ada | y | 1 | 0,67 |
| 2 | Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui | y | 1 | 0,67 |
| 3 | Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek | a | 1 | 0,67 |
| | | | | 2,00 |
| b. KUALITAS PK (6,5%) | | | | |
| 4 | Sasaran telah berorientasi hasil | b | 0,75 | 0,98 |
| 5 | PK telah menyajikan IKU | a | 1 | 1,30 |
| 6 | Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | b | 0,75 | 0,98 |
| 7 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | c | 0,5 | 0,65 |
| 8 | Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT | a | 1 | 1,30 |
| | | | | 5,20 |
| c. IMPLEMENTASI PK (4%) | | | | |
| 9 | Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala | c | 0,5 | 0,67 |
| 10 | Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan | b | 0,75 | 1,00 |
| 11 | Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan | b | 0,75 | 1,00 |
| | | | | 2,67 |
| | | | | 19,11 |
| B. PENGUKURAN KINERJA (25%) | | | | |
| I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) | | | | |
| 1 | Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal | y | 1 | 2,50 |
| 2 | Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja | b | 0,75 | 1,88 |
| | | | | 4,38 |
| II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) | | | | |
| 3 | IKU telah dapat diukur secara obyektif | b | 0,75 | 0,78 |
| 4 | IKU telah menggambarkan hasil | b | 0,75 | 0,78 |
| 5 | IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur | b | 0,75 | 0,78 |
| 6 | IKU telah cukup untuk mengukur kinerja | b | 0,75 | 0,78 |
| 7 | IKU telah diukur realisasinya | b | 0,75 | 0,78 |
| 8 | Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif | b | 0,75 | 0,78 |
| 9 | Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil | b | 0,75 | 0,78 |
| 10 | Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur | b | 0,75 | 0,78 |
| 11 | Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarnya | b | 0,75 | 0,78 |
| 12 | Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya | b | 0,75 | 0,78 |
| 13 | Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan | b | 0,75 | 0,78 |
| 14 | Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) | c | 0,5 | 0,52 |
| | | | | 9,11 |
| III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%) | | | | |
| 15 | IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran | b | 0,75 | 1,13 |
| 16 | IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja | b | 0,75 | 1,13 |
| 17 | IKU telah direviu secara berkala | a | 1 | 1,50 |
| 18 | Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja | b | 0,75 | 1,13 |
| 19 | Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala | c | 0,5 | 0,75 |
| | | | | 5,63 |
| | | | | 12,00 |
| C. PELAPORAN KINERJA (15%) | | | | |
| I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) | | | | |
| 1 | LKJP telah disusun | y | 1 | 1,50 |
| 2 | LKJP telah disampaikan tepat waktu | y | 1 | 1,50 |
| | | | | 3,00 |
| II. KUALITAS PELAPORAN (7,5%) | | | | |
| 3 | LKJP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya | y | 1 | 0,94 |
| 4 | LKJP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output/outcome | b | 0,75 | 0,70 |
| 5 | LKJP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU | b | 0,75 | 0,70 |
| 6 | LKJP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan | b | 0,75 | 0,70 |

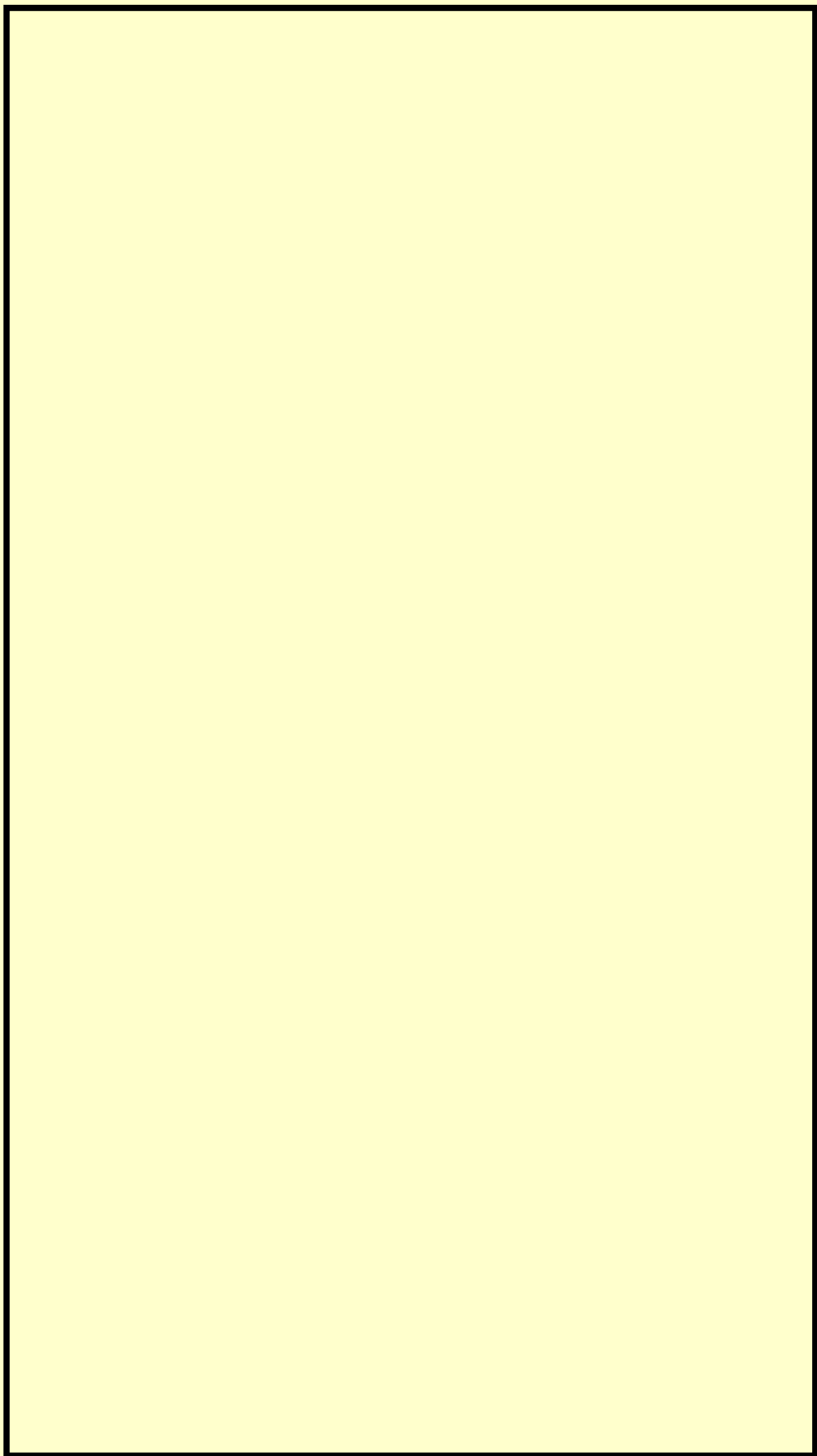
| | | | | |
|--|--|---|------|-------|
| 7 | LKJIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja | c | 0,5 | 0,47 |
| 8 | LKJIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan | b | 0,75 | 0,70 |
| 9 | LKJIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja | b | 0,75 | 0,70 |
| 10 | Informasi kinerja dalam LKJIP dapat diandalkan | b | 0,75 | 0,70 |
| | | | | 5,63 |
| III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%) | | | | |
| 11 | Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan | b | 0,75 | 0,84 |
| 12 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi | b | 0,75 | 0,84 |
| 13 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja | b | 0,75 | 0,84 |
| 14 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja | b | 0,75 | 0,84 |
| | | | | 3,36 |
| | | | | 7,67 |
| D. EVALUASI INTERNAL (10%) | | | | |
| I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) | | | | |
| 1 | Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja | y | 1 | 0,50 |
| 2 | Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya | a | 0,75 | 0,38 |
| 3 | Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja dibawahnya telah dilakukan | a | 1 | 0,50 |
| 4 | Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan | y | 1 | 0,50 |
| | | | | 1,88 |
| II. KUALITAS EVALUASI (5%) | | | | |
| 5 | Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB | b | 0,75 | 0,63 |
| 6 | Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompentensi | b | 0,75 | 0,63 |
| 7 | Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap | c | 0,50 | 0,42 |
| 8 | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi | b | 0,75 | 0,63 |
| 9 | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja memberikan penilaian atas akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja | b | 0,75 | 0,63 |
| 10 | Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan | b | 0,75 | 0,63 |
| | | | | 3,54 |
| III. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI (3%) | | | | |
| 11 | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja | b | 0,75 | 1,13 |
| 12 | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja | b | 0,75 | 1,13 |
| | | | | 2,25 |
| | | | | 13,33 |
| E. CAPAIAN KINERJA (20%) | | | | |
| I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%) | | | | |
| 1 | Target dapat dicapai | b | 0,75 | 1,88 |
| 2 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | b | 0,75 | 1,88 |
| 3 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | c | 0,5 | 1,25 |
| | | | | 5,00 |
| II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%) | | | | |
| 4 | Target dapat dicapai | b | 0,75 | 3,13 |
| 5 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | b | 0,75 | 3,13 |
| 6 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | c | 0,5 | 2,06 |
| | | | | 8,33 |
| HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%) | | | | |
| | | | | 76,70 |











KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TAHUN : 2016

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN/BOBOT (%) | UNIT KERJA | | TOTAL |
|--|---|------------|-------|--------------|
| | | Y/T | NILAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. PERENCANAAN KINERJA (30%) | | | | 24,48 |
| I. RENCANA STRATEGIS (10%) | | | | 7,93 |
| a. PEMENUHAN RENSTRA (2%) | | | | |
| 1 | Dokumen Renstra telah ada | y | 1 | 1,00 |
| 2 | Dokumen Renstra telah memuat visi, misi tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah | b | 0,75 | 0,75 |
| b. KUALITAS RENSTRA (5%) | | | | |
| 3 | Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil | b | 0,75 | 0,54 |
| 4 | Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program | b | 0,75 | 0,54 |
| 5 | Renstra telah menyajikan IKU | a | 1 | 0,71 |
| 6 | Indikator kinerja tujuan (cutput/outcome) dan sasaran (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | b | 0,75 | 0,54 |
| 7 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | b | 0,75 | 0,54 |
| 8 | Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra alasannya | b | 0,75 | 0,54 |
| 9 | Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) | b | 0,75 | 0,54 |
| c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) | | | | |
| 10 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan | b | 0,75 | 0,56 |
| 11 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra unit kerja/satker dibawahnya | b | 0,75 | 0,56 |
| 12 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran | b | 0,75 | 0,56 |
| 13 | Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala | b | 0,75 | 0,56 |
| | | | | 2,25 |
| II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7,5%) | | | | 6,34 |
| a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1,5%) | | | | |
| 1 | Dokumen RKT telah ada | y | 1 | 0,50 |
| 2 | Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA | y | 1 | 0,50 |
| 3 | Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan | a | 1 | 0,50 |
| b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3,75%) | | | | |
| 4 | Sasaran telah berorientasi hasil | b | 0,75 | 0,47 |
| 5 | Target dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran | b | 0,75 | 0,47 |
| 6 | RKT telah menyajikan IKU | a | 1 | 0,50 |
| 7 | Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | b | 0,75 | 0,47 |
| 8 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | b | 0,75 | 0,47 |
| 9 | Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra | b | 0,75 | 0,47 |
| | | | | 2,93 |
| c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2,25%) | | | | |
| 10 | Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK) | a | 1 | 0,75 |
| 11 | Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT Unit kerja/satker dibawahnya | b | 0,75 | 0,58 |
| 12 | Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (s.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA) | b | 0,75 | 0,58 |
| | | | | 1,93 |

